Wajah Hukum

Vol 9, No 2 (2025): Oktober, 983-994
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v9i2.1996

Legalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Bima Guntara
Ilmu Hukum Universitas Pamulang
Correspondence: dosen02148@unpam.ac.id

Article Info
Submitted: *15-10-2025*
Revised: *15-10-2025*
Accepted: *29-10-2025*
Published: *29-10-2025*

Keywords:
Abortion, Rape Victims, Human Rights.

Abstract

Legalizing abortion for rape victims is meant to improve the legal policy and enforcement of better and more accommodative to the protection of the victims of rape. Unborn babies also have the right to life. These differing perspectives on these two human rights have sparked much debate in society. This research is a normative legal analysis aimed at identifying legal concepts and doctrines related to the legalization of abortion for rape victims from a human rights perspective. The research approaches used in this study are the statute approach and the conceptual approach. The research approach used in this study is a statute approach and a conceptual approach. Research results (1) the government has issued regulations regarding the legalization of abortion for rape victims but does not have strong legal certainty. (2) The rights of women and the right of the fetus to life are equally protected by the laws of Indonesia. In the case of legalization of abortion for rape victims, the State applies the concept of limitation to the fulfilment of the right to life of the fetus, under the terms and conditions established by the Act governing the conditions and conditions permitted for abortions for the victims of rape.

Kata Kunci:
Aborsi, Korban Perkosaan , Hak Asasi Manusia.

Abstrak

Legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dimaksudkan sebagai peningkatan kebijakan hukum dan penegakan hukum yang lebih mendukung terkait perlindungan korban pemerkosaan. Legalisasi aborsi bagi korban perkosaan juga sebagai upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan. Namun di lain pihak, Janin juga memiliki hak untuk hidup. Perbedaan pandangan mengenai kedua hak dasar ini telah memicu kontroversi yang cukup besar di masyarakat. Studi ini melakukan analisis hukum normatif untuk mengungkap konsep dan doktrin hukum tentang legalitas aborsi bagi korban perkosaan dari sudut pandang hak asasi manusia. Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan (1) Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait legalisasi aborsi bagi korban perkosaan namun tidak memiliki kepastian hukum yang kuat. (2) Antara hak asasi perempuan dan hak hidup janin memperoleh perlindungan yang sama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal legalisasi aborsi bagi korban perkosaan negara menerapkan konsep limitasi terhadap pemenuhan hak hidup janin, dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan diperbolehkannya aborsi bagi korban perkosaan. Sehingga dalam hal ini tidak ada pelanggaran terhadap hak hidup janin selama memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia didirikan atas dasar sila kerohanian Pancasila, yang mencakup suasana kerohanian dan cita-cita hukum. Sila ini berfungsi sebagai sumber nilai, norma, dan standar moral dan hukum, serta mengatur undang-undang dasar, baik peraturan yang dikodifikasikan (seperti Konstitusi) maupun hukum tidak tertulis (seperti Konvensi). Sistem peradilan dan pembentukan perundang-undangan harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah tertuang dalam Pancasila dan mengatakan bahwa memanusiakan manusia yang berkeadilan dan berbudaya, sehingga mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Meskipun demikian, sistem peradilan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), belum secara efektif dan manusiawi melindungi hak dan status korban kejahatan. Baik dari sudut pandang normatif maupun filosofis, hak dan status korban tidak setara dengan pelaku dalam sistem peradilan pidana.

Salah satu contoh ketidakmaksimalan manifestasi keadilan tersebut ada dalam tindak pidana pemerkosaan. Hukum Pidana acap kali hanya focus dalam pencarian fakta yang dapat mempidanakan pelaku kejahatan Pemerkosaan seberat beratnya namu jika gagal untuk melihat korban yang telah dirusak akibat Tindakan hal tersebut, terlebih apabila korban mengalami kehamilan akibat perkosaan tersebut. Kehamilan yang tidak disengaja dan tidak diharapkan oleh sang ibu akibat dampak pemerkosaan ini dapat mengganggu kondisi psikis korban sehingga kerap kali korban memilih untuk melakukan tindakan aborsi.

Aborsi adalah ancaman atau pengeluaran janin sebelum berhasil hidup diluar rahim Definisi ini didasarkan pada kehamilan yang berlangsung dengan janin yang beratnya kurang dari 500 gram atau berusia kurang dari 20 minggu. Atau, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebelum 22 minggu. Terdapat dua jenis aborsi yang berbeda berdasarkan kejadiannya: aborsi spontan, yang terjadi secara alami, tidak disengaja, dan umumnya tidak diinginkan oleh orang yang melakukannya, dan aborsi yang diinduksi, yang dilakukan secara sengaja karena wanita tersebut tidak ingin hamil.[1]

Aborsi *Provocatus* ini dibagi lagi menjadi *Abortus Therapeuticus* atau pada umumnya disebut aborsi medis, merupakan aborsi karena tindakan Aborsi yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa bantuan medis ketika nyawa ibu terancam jika kehamilan dibiarkan berlanjut. Dalam kebanyakan kasus, aborsi jenis ini memerlukan persetujuan dari dua atau tiga tim medis terpisah. Jenis aborsi ini dikenal sebagai aborsi kriminal oleh Tindakan tidak diizinkan, tidak berdasarkan alasan medis yang sah, dan tidak dilakukan di tempat umum.[2] Untuk menjawab permasalahan fundamental mengenai tindakan aborsi yang mungkin saja dilakukan oleh korban perkosaan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai legalisasi aborsi bagi korban perkosaan yang termanifestasi di dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan tersebut, khususnya pasal 31 dan 34 yang mengatur mengenai legalisasi aborsi bagi korban perkosaan. Legalisasi aborsi bagi korban perkosaan ini dimaksudkan sebagai perbaikan kebijakan hukum dan penegakan hukum yang lebih baik dan akomodatif terhadap perlindungan korban perkosaan.

Melegalkan aborsi bagi korban pemerkosaan juga merupakan upaya untuk memenuhi hak reproduksi perempuan, yang mencakup pengakuan dan pembelaan hak untuk hidup. Setiap perempuan memiliki ha katas kehidupan yang sehat baik disik dan emosi, dalam batasan perlindungan hukum. Ini berarti bahwa jika nyawa seorang perempuan terancam, yang menyebabkannya menjadi sakit dan cacat, ia berhak atas perawatan kesehatan dan perlindungan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhannya, termasuk didalamnya adalah pelayanan tindakan aborsi. Dasar hukum dalam permasalahan terkait hak reproduksi perempuan dapat dikaji melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945menyatakan bahwa setiap orang mempunyai martabat dan harga diri yang melekat dan patut dihormati sehingga mereka dapat menikmati kesehatan jasmani dan rohani, serta memperoleh akses terhadap perawatan medis yang bermutu, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur hak reproduksi perempuan, yang menyatakan bahwa: Setiap Orang berhak:

a. Menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
b. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai Kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
c. Menerima pelayanan dan pemulihan Kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Didukung oleh PP no 61 tentang Kesehatan reproduksi, uu no 17 tahun 2003 yang telah menggantikan uu no 39 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa korban perkosaan yang hamil dapat melakukan aborsi.

Di sisi lain, jika kita mempertimbangkan bahwa salah satu tujuan Anak yang belum lahir juga berhak untuk bertahan hidup, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Anak yang belum lahir juga berhak

[1] Tina Amarawati, *Hukum dan Abortusi,* (Yogyakarta : Deepublish, 2013), hlm.7.

[2] Muhammad, Kemal Fikar, "Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Ipteks, Vol. 5, No. 1*, (2020) : 138-150.

untuk bertahan hidup, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini diperjelas dalam teks utama UUD 1945, yaitu Pasal 28 A dan 28 B ayat (2). Setiap manusia, termasuk mereka yang belum dilahirkan, mempunyai hak yang melekat pada dirinya, yaitu hak untuk hidup, hak atas penghidupan, dan hak untuk berkembang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[3] Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia harus menghargai janin sebagai tahap awal kehidupan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga melarang tindakan aborsi dan menggolongkannya ke dalam kejahatan terhadap nyawa, hal ini diatur di dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP. Dalam rumusan pasal-pasal dalam KUHP tersebut aborsi dilarang dengan alasan apapun, aborsi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terutama hak hidup janin. Sudut pandang terhadap kedua Hak Asasi Manusia yang berbeda ini banyak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Bagi mereka yang menentang aborsi (Kelompok *Prolife*) menyamakan aborsi dengan kejahatan terhadap nyawa si janin. Sedangkan bagi mereka yang mendukung aborsi (Kelompok *Prochoice*) beranggapan bahwa seorang wanita mempunyai hak untuk mengambil keputusan atas dirinya. Perdebatan mengenai kedua wacana Hak Asasi Manusia tersebut lantas memunculkan pertanyaan, hak siapakah yang seharusnya di kedepankan dan dilindungi dalam hal terjadinya tindakan aborsi pada korban perkosaan.

METODE

Penulis akan membahas kesulitan hukum yang timbul akibat penelitian ini, Metodologi penelitian yang digunakan bersifat normatif, berfokus pada metode aborsi yang digunakan oleh perempuan korban pemerkosaan, dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metodologi aturan dan dasar teori. Tiga dokumen hukum berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pembuatan kebijakan dan metode teoritis, memanfaatkan penelitian hukum untuk menganalisis hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan hipotesis mengenai keberadaan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menyoroti penerapan praktis terkait prinsip-prinsip hukum atau undang-undang dan peraturan yang relevan. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yang secara khusus bertujuan untuk menggambarkan secara tepat karakteristik individu, kondisi, gejala, atau fenomena yang ada dalam masyarakat.
2. Rancangan Kegiatan

   Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan yaitu pada bulan Juli 2024 – Desember 2024. Peneliti melaksanakan proses pengambilan data dengan cara wawancara dengan informan yang memberikan informasi mengenai aborsi dari perspektih Hak Asasi Manusia. Dengan adanya rancangan kegiatan dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang akhirnya disempurnakan menjadi hasil penelitian
3. Ruang Lingkup dan Objek

   Ruang lingkup penelitian memberikan batasan permasalahan yang diteliti sehingga fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan legalisasi aborsi bagi korban perkosaan. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu terkait hak asasi manusia dalam pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan.
4. Bahan dan Alat Utama
   a. Sumber Data Primer
      1) Undang undang dasar negara republic Indonesia 1945
      2) Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
      3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang no 23 tahun 2002 tentang perlingungan anak
      4) uu Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
      5) PP no. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi

[3] Siti Ngainnur Rohmah dan Budiyanto, Budiyanto, "Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 7, No.4*, (2020): 801-812.

6) Permen Kesehatan RI No 3 tahun 2016 tentang pelatihan dan penyediaan pelayanan aborsi untuk indikasi medis kedaruratan dan kehamilan akibat perkosaan

b. Sumber Data Sekunder
   1) Teks hukum yang relevan dengan penelitian ini
   2) Disertasi hukum akademis yang relevan dengan penelitian ini
   3) Jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini
   4) Publikasi relevan yang bersumber dari internet terkait penelitian ini

5. Tempat

   Penelitian ini dilaksanakan di Komnas HAM RI dan juga Perpustakaan di berbagai perguruan tinggi untuk menunjang hasil dari penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

   Penulis mengumpulkan data melalui wawancara. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber langsung melalui percakapan atau sesi tanya jawab. Wawancara adalah interaksi tatap muka di mana pewawancara mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada informan. Definisi Operasional Variabel Penelitian

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

   Bagaimana variabel penelitian didefinisikan untuk tujuan praktis memberikan klarifikasi atas frasa yang digunakan dalam judul penelitian. Oleh karena itu, penulis harus jelaskan setiap kata yang digunakan dalam judul penelitian menggunakan makna operasional tersebut. Oleh karena itu, definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

   a. Aborsi adalah prosedur medis untuk mengakhiri kehamilan, yang dapat dilakukan melalui obat-obatan atau tindakan bedah. Tindakan ini bertujuan untuk mengeluarkan janin dan plasenta dari rahim wanita dan berbeda dengan keguguran, di mana kehamilan berakhir secara spontan.
   b. Pemerkosaan merupakan setiap bentuk hubungan seksual yang dipaksakan yang dapat mengakibatkan cedera fisik, tekanan emosional, dan kerusakan psikologis pada korban.
   c. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap orang sejak lahir, bersifat universal, yang tidak bisa ditarik Kembali. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang patut kita hormati sepenuhnya, dipelihara, dengan perlindungan negara, sistem hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga martabat manusia.

8. Teknis Analis

   Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sebagai teknik analisisnya. Analisis kualitatif mengacu pada pemeriksaan data yang digunakan untuk dimensi normatif (hukum) melalui metodologi deskriptif, yang melibatkan pengartikulasian data yang diperoleh dan menghubungkannya untuk mencapai kepastian tentang kebenaran atau kebalikannya, sehingga menghasilkan perspektif baru atau memperkuat perspektif yang sudah ada, atau sebaliknya.[4]

HASIL

Pengaturan Hukum Mengenai Legalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan Di Indonesia

Sejak zaman dahulu hingga kini, Kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya melarang semua manusia untuk Tindakan pengguguran. Namun demikian, hukum berkembang berbanding lurus dengan perkembangan manusia itu sendiri. Dalam perkembangannya, hukum yang berlaku di Indonesia memberikan pengecualian diperbolehkannya pengguguran janin atas akibat Tindakan darurat masalah dan kata-kata yang berhubungan dengan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengecualian diperbolehkannya pengguguran janin dalam UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang-undang ini aborsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang dilarang, namun dalam keadaan tertentu dapat di perbolehkan sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 75, 76, dan 77. Kebijakan ini sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan korban kejahatan perkosaan sekaligus memberikan pemenuhan terhadap hak asasi perempuan atas hak kesehatan reproduksinya.

Pasal 75 ayat (2) menetapkan bahwa aborsi hanya jika diperbolehkan dalam kasus kehamilan yang menunjukkan indikasi awal kedaruratan situasi kesehatan dan kesejahteraan ibu janin selama

[4] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm.126.

kehamilan dengan kelainan genetic atau anomaly kongenital, atau kehamilan yang dianggap sulit diperbaiki hingga menyulitkan kelangsungan hidup bayi diluar kandungan, serta kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan tekanan mental di antara para korban. Pasal 76 menetapkan bahwa Aborsi tidak boleh dilakukan sesuai dengan Pasal 75 jika kehamilan telah berlangsung lebih dari enam minggu, dihitung dari hari pertama periode menstruasi terakhir. Dalam rumusan pasal di atas, tanda-tanda mengkhawatirkan dari masalah medis yang serius dan trauma psikologis dihubungkan dengan kata "atau", hal ini berarti kedua hal tersebut merupakan klausul yang berbeda, dan tidak perlu dipenuhi semua unsurnya, sehingga dapat dikatakan bahwa trauma psikologis tidak dapat disamakan dengan indikasi kedaruratan medis. Kecuali jika penggunaanya kata "dan", maka setiap klausul harus dipenuhi semua. Namun penulis berpendapat, bahwasannya trauma psikologis dapat menyebabkan korban kehilangan arah dan kehilangan kemampuan untuk berpikir logis, yang dapat menyebabkan mereka membunuh diri mereka sendiri atau bahkan janin mereka. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa implikasi medis dan tekanan psikologis yang dialami korban perkosaan dapat membahayakan nyawa ibu dan bayinya. Pada pasal 75 ayat 4 maka menetapkan pengaturan terkait indikator darurat medis dan perkosaan datur dengan PP.

Pada tahun 2014, pemerintah secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menguraikan pengecualian aborsi yang diuraikan dalam Undang-Undang Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini menjabarkan secara rinci peraturan mengenai aborsi di bagian awal Bab IV, yang membahas pengecualian dari larangan aborsi berdasarkan kebutuhan medis dan pemerkosaan. Peraturan mengenai izin aborsi bagi korban perkosaan diuraikan dalam Pasal 31 ayat (2) yang menetapkan bahwa pengguguran janin Hal ini hanya dapat dilakukan bagi korban perkosaan jika usia kehamilannya kurang dari 40 hari, sebagaimana diperkirakan dari siklus menstruasi terakhir pertama, menurut pasal 31 ayat 2. Seperti diuraikan pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk memastikan kehamilan diperlukan surat keterangan dokter, usia kehamilan pada saat kejadian, serta keterangan dari penyidik dan psikolog. dan dokter spesialis lain yang terkait dengan dugaan perkosaan tersebut.

Istilah "paling lama" dalam aturan tersebut menentukan durasi maksimum di mana kehamilan dapat dihentikan, yang menunjukkan bahwa usia yang diizinkan untuk aborsi setelah pemerkosaan adalah 40 hari. Akibatnya, jika aborsi dilakukan di luar usia kehamilan yang ditentukan untuk korban pemerkosaan dalam aturan ini, hal tersebut merupakan kejahatan dan melanggar hukum negara bagian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) di atas, maka timbul pertanyaan, bagaimana jika korban perkosaan masih mengalami trauma psikologis yang hebat dan dapat mengancam nyawanya dan kehamilannya sudah lewat dari empat puluh hari? Apakah kehamilan ini masih dapat diaborsi? Maka disinilah potensi terjadinya pelanggaran hak asasi perempuan yang hamil akibat korban perkosaan tersebut. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwa aborsi bagi korban Pemerkosaan yang bertanggung jawab dan berkualitas tinggi harus dilakukan di lingkungan yang aman. Prosedur aborsi harus dilakukan secara eksklusif oleh dokter yang berkualifikasi di fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dan hanya dapat dilakukan atas permintaan atau persetujuan tegas dari perempuan hamil yang bersangkutan.

Mengenai standar dokter yang di sebutkan di atas telah dijelaskan dalam pasal 36, dokter yang diizinkan melakukan praktik, Tidak boleh menjadi dokter yang mensertifikasi usia kehamilan akibat pemerkosaan atau anggota komite yang menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk aborsi. Sebaliknya, mereka harus mendapatkan pelatihan dari penyedia layanan terakreditasi. Aborsi hanya boleh dilakukan setelah melalui proses konseling yang terdiri atas pra konseling dan pasca konseling. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 37. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 38, bilamana setelah mengetahui tentang aborsi dan segala efek sampingnya sebagaimana yang telah dijabarkan pada proses konseling, kemudian korban perkosaan memutuskan untuk membatalkan aborsi dan meneruskan proses kehamilannya korban wajib diberikan pendampingan selama hamil oleh konselor, pendampingan yang dilakukan berupa pendampingan psikologis, sosiologis dan pendampingan medis.

Jika diperhatikan lebih lanjut, rumusan pasal dalam PP kesehatan reproduksi ini tidak mencantumkan kata "trauma psikologis" sebagai syarat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan. Dengan demikian, menurut PP ini perempuan yang hamil akibat perkosaan, meskipun tidak ditunjukkan mengalami trauma psikologis yang mengancam nyawanya, masih diizinkan untuk melakukan aborsi.

Pembatasan tambahan terkait pelaksanaan aborsi aman diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 3 Tahun 2016, yang berkaitan dengan Pelatihan dan Penyediaan Layanan Aborsi untuk Keadaan Darurat Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 berfungsi sebagai pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aturan ini menekankan komponen teknis pelatihan bagi dokter yang melakukan aborsi dan memberikan layanan aborsi di bidang tersebut.[5]

PERMENKES ini menjelaskan bahwa pelatihan dan penyediaan layanan aborsi untuk keadaan darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kompetensi dalam memberikan layanan aborsi yang aman, berkualitas tinggi, dan bertanggung jawab. Bagian ketiga dari PERMENKES ini menjelaskan tim kelayakan aborsi, yang menerima pelatihan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bersama dengan organisasi profesi. Dokter yang memiliki sertifikat pelatihan dapat bergabung dengan tim kelayakan aborsi atau menawarkan layanan aborsi dalam kasus krisis medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Namun, dokter yang berafiliasi dengan tim tidak boleh menyediakan layanan aborsi untuk keadaan darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan pada pasien yang sama.

Tim kelayakan aborsi bertanggung jawab untuk menilai keberadaan indikator kedaruratan medis dan dapat melakukan pemeriksaan setelah menerima rujukan dokter terkait masalah medis spesifik pada kehamilan akibat pemerkosaan. Temuan penilaian tim kelayakan aborsi disajikan sebagai sertifikat usia kehamilan dan/atau kelayakan aborsi. Untuk membuktikan kehamilan akibat pemerkosaan, bukti harus mencakup usia kehamilan yang sesuai dengan episode pemerkosaan sebagaimana didokumentasikan dalam sertifikat medis, beserta kesaksian dari detektif, psikolog, dan/atau spesialis lain terkait dugaan pemerkosaan. Namun demikian, permasalahannya terletak pada variabilitas batasan usia kehamilan untuk aborsi di berbagai yurisdiksi. Dari sudut pandang Islam, sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang mengatur legalisasi aborsi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) awalnya mengeluarkan kebijakan tentang aborsi aman dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Fatwa MUI ini terdiri dari ketentuan umum dan hukum. Ketentuan umum tersebut menggambarkan dua kondisi: darurat dan kebutuhan. Ketika ada masalah, kegagalan seseorang untuk menahan diri dari tindakan yang dilarang dapat mengakibatkan kematian atau hampir mati. Sementara itu, hajat mengacu pada keadaan di mana seseorang, dengan menahan diri dari tindakan yang dianggap melanggar hukum, akan menghadapi kesulitan yang signifikan.

Pada bagian kedua mengenai peraturan hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa aborsi hukumnya haram setelah blastokista menempel pada dinding rahim ibu (nidasi). Namun, MUI memberikan pengecualian untuk aborsi yaitu dalam keadaan darurat atau terpaksa. Keadaan darurat yang disebutkan di atas mencakup kasus-kasus di mana seorang ibu hamil mengalami penyakit fisik yang serius, termasuk kanker stadium lanjut, tuberkulosis kavitas, dan kondisi kritis lainnya yang dinilai oleh tenaga medis. Persyaratan yang disebutkan mencakup janin yang diidentifikasi memiliki kelainan genetik yang sulit diperbaiki pascanatal, serta kehamilan akibat perkosaan, yang dinilai oleh majelis hukum yang terdiri dari keluarga korban, tenaga medis, dan pemuka agama. Aborsi yang dilakukan pada kehamilan akibat perkosaan yang memenuhi syarat-syarat tersebut harus dilakukan sebelum janin mencapai usia 40 hari. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang aborsi dalam kasus kehamilan akibat perzinaan. Dalam istilah fikih, zina berarti hubungan seksual di luar nikah yang biasanya dilakukan dengan suka sama suka. Perkosaan tidak termasuk ke dalam zina karena ada unsur pemaksaan dalam tindakannya.

Salah satu contoh kasus pemerkosaan yang terjadi pada perempuan berumur 15 tahun di Jambi, korban mengalami kehamilan akibat diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri. Namun karena ketidaktahuannya terhadap layanan aborsi aman, korban melakukan aborsi dan Pengadilan Negeri Muara Bulian memvonisnya dengan hukuman enam bulan penjara. Akibat dari desakan masyarakat yang membuat gerakan petisi dan aksi, korban akhirnya diputus bebas.[6] Contoh lain kasus pemerkosaan yang korbannya mengalami kehamilan terjadi pada anak 12 tahun yang diperkosa oleh tetangganya sendiri yang berusia 56 tahun di Jombang, Jawa Timur. Korban dan keluarganya mencoba mengakses

[5] Aroma Elmina, *Legalisasi Aborsi*, (Yogyakarta: *UII Press*, 2019), hal.14.

[6] https://projectmultatuli.org/ia-diperkosa-lalu-hamil-disarankan-aborsi-tapi-polisi-melarangnya-korban-trauma-berat/, Diakses pada 29 Juni 2024.

layanan aborsi aman bagi korban perkosaan, akan tetapi pihak polres jombang menolak permintaan korban atas surat keterangan adanya tindakan perkosaan yang dialami korban dengan alasan tidak ada pengalaman.[7]

Dari contoh-contoh kasus diatas dan seiring dengan meningkatnya angka kejahatan asusila terutama kasus pemerkosaan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan regulasi baru mengenai legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan. Undang-Undang ini mencabut seluruh peraturan yang ada dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama. Pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru pada dasarnya sama dengan Undang-Undang Kesehatan yang lama, yakni melarang setiap orang melakukan aborsi dengan memberikan pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 60. Pasal 60:

(1) Aborsi dilarang bagi semua orang, kecuali yang diizinkan oleh kriteria yang tercantum dalam KUHP
(2) Pengguguran kandungan dilakukan berdasarkan kriteria yang disebutkan pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
    a. oleh dokter yang berkualifikasi dengan dengan bantuan nakes yang kompeten dan berwenang;
    b. berada di fasilitas atau rumah sakit yang memenuhi standart yang ditetapkan menteri
    c. dengan persetujuan perempuan hamil dan pasangannya, kecuali dalam kasus perkosaan.

Bila dicermati lebih lanjut, dalam Undang-Undang kesehatan yang baru tidak dimuat secara eksplisit mengenai syarat dan ketentuan diperbolehkannya aborsi aman. Akan tetapi syarat dan ketentuan baru mengenai legalisasi aborsi ini didasarkan pada KUHP Nasional, sebagaimana bunyi pasal "*sesuai ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Syarat dan ketentuan yang di maksud adalah mengenai kriteria pengecualian kehamilan yang boleh diaborsi dan batas usia kehamilannya, yakni 14 (empat belas) minggu. Dimana ketentuan ini hanya ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Kesehatan yang baru hanya merujuknya. Namun demikian, mengingat KUHP nasional baru bisa di berlakukan di tahun 2026 atau 3 tahun setelah pengundangannya, maka ketentuan mengenai pengecualian aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru pun belum bisa di berlakukan. Hal ini lantas menimbulkan ketidakpastian hukum aturan mengenai pengecualian aborsi baik atas alasan indikasi kedaruratan medis maupun hamil akibat korban perkosaan.

Kemudian dalam Undang-Undang kesehatan yg baru pada Pasal 62 dikatakan bahwasannya peraturan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), akan tetapi sampai saat penelitian ini dilakukan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan dari Undang-Undang kesehatan yang baru belum diterbitkan. Dikarenakan regulasi atau ketentuan baru mengenai legalisasi aborsi khususnya bagi bagi korban perkosaan yang baru tidak berkepastian hukum, maka dalam hal terjadinya terjadinya kasus aborsi aman bagi korban perkosaan hukumnya yang diterapkan atau ketentuan yang diberlakukan adalah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kesehatan yang baru tidak secara resmi mencabut peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan yang lama. Hal ini sebagaimana mana dijelaskan dalam ketentuan penutup atau pasal 453 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menurut penulis, dampak dari ketidakpastian hukum dalam rumusan suatu pasal dalam Undang-Undang dapat menyebabkan kekeliruan tentang benar atau salahnya tindakan yang dilakukan. Hal ini tentu akan mempengaruhi aspek perlindungan hukum terhadap seseorang. Ketika aspek perlindungan hukum kurang terpenuhi, potensi pelanggaran hak bisa saja terjadi. Padahal negara telah memberikan jaminan perlindungan bagi rakyatnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28D UUD NRI 1945, dimana seseorang mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil Mereka juga berhak diperlakukan setara oleh negara.

Sudut Pandang Hak Asasi Manusia Terhadap Legalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan

Di Indonesia pengakuan terhadap adanya hak Asasi Manusia telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka, kemudian perkembangan mengenai HAM di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat pasca kemerdekaan, hingga lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang HAM, pasal 1 angka 1 mendefinisikan HAM sebagai:

[7] *Ibid.*

".....seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

Mengenai aborsi bagi korban perkosaan sangat menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, Pertentangan ini umumnya datang dari kelompok *pro-life*, kelompok ini menganggap bahwasannya janin yang ada dalam kandungan seorang korban perkosaan juga mempunyai hak hidup, mendapatkan perlindungan dan tidak seharusnya digugurkan. Eka Christiningsih Tanlain, S. Sos., M.Si, selaku penyuluh sosial ahli madya di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa pertentangan ini terjadi karena masyarakat Indonesia mempunyai *background* yang beragam seperti sejarah, agama, adat istiadat dan keyakinan-keyakinan lain mengenai apakah aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan boleh dilakukan atau tidak.[8]

Mengenai hak untuk hidup, khususnya hak janin, hak ini merupakan hak yang paling hakiki dan tidak dapat diganggu gugat. Hak ini tegas dan tidak dapat dibatasi oleh negara dalam keadaan apa pun. Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang.[9]

Di Indonesia, hak untuk hidup terutama diatur oleh Bab XA UUD 1945, yaitu Pasal 28A dan 28B, yang mengartikulasikan ketentuan-ketentuannya. Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B:

(1) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan prasangka.

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memuat istilah "janin", meskipun penggunaan frasa "anak" tidak mengurangi perlindungan negara terhadap hak hidup janin. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjabarkan hak untuk hidup, larangan penyiksaan, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak bebas dari perbudakan, hak atas pengakuan hukum sebagai manusia, dan perlindungan dari tuntutan hukum berdasarkan hukum yang berlaku surut, yang kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa adalah fokus utama bahwasannya ada jaminan hidup dan janin tidak akan tersiksa karena dalam aborsi banyak berbagai cara yang digunakan untuk menyiksa janin, karena pada kenyataannya tidak ada metode aborsi yang tidak melibatkan penyiksaan terhadap janin.

Perlindungan terhadap hak hidup janin sebagai anak lebih jelas lagi diatur dalam diatur Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga membahas hak-hak anak. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa anak, bahkan dalam kandungan, memiliki hak untuk hidup, kelangsungan hidupnya, dan peningkatan kualitas hidupnya. Hak-hak anak diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan demi kesejahteraannya. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas kemudian di dukung oleh ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), dijelaskan bahwasanya "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Ketentuan ini semakin meyakinkan bahwasannya janin/fetus juga mempunyai Hak Asasi yang sama di mata hukum. Hal ini sebagaimana bunyi alinea Keempat pembukaan UUD 1945, negara wajib melakukan perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu perlindungan yang dimaksud tidak hanya diberikan kepada orang dalam arti orang pada umumnya (orang dewasa), akan tetapi juga kepada janin dalam kandungan.

---

[8] Eka Christiningsih Tanlain, S. Sos., M.Si, *Wawancara*, Penyuluh Sosial Ahli Madya Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, 09 Juli 2024.

[9] Bima Guntara dan Fikri Jamal, "Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Literatur Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2*, (2021): 237.

Selanjutnya pengakuan akan hak asasi janin juga disebutkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, dimana lafal sumpah dokter di Indonesia telah diakui dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1960. Dalam pasal 1 KODEKI 2012 angka 5 dijelaskan bahwa seorang dokter tidak akan menggunakan pemahaman mereka tentang sesuatu yang bertentangan dengan sifat manusia, terlepas dari bahaya yang mereka hadapi. Kemudian dalam angka 6 dipertegas lagi dengan pernyataan bahwa setiap Dokter harus menghargai setiap kehidupan manusia sejak saat pembuahan. Melalui pendekatan konsepsi, CB Kusmaryanto mendefinisikan bahwasannya janin tetap dianggap manusia melalui cara pembuahan, di mana zigot muda telah membentuk struktur genetiknya sendiri yang tidak sama dengan struktur genetik induknya. Ia tumbuh (membelah) dengan menggunakan energi yang terdapat di dalam sel itu sendiri, tanpa harus mendapatkannya dari luar. Dengan kata lain, zigot menjadi mandiri dan berubah menjadi orang baru. Singkatnya, Ketika sel telur bertemu dengan sperma, maka masa depan seseorang sudah tersedia, karena potensi aktivitas manusia sudah ada, tinggal menunggu perkembangan selanjutnya untuk mewujudkan manusia tersebut secara utuh. Oleh karena itu, janin sebagai seorang anak juga harus mendapatkan perlindungan hak untuk hidup.[10] Berdasarkan lafal sumpah dokter dan kapan janin dapat dianggap sebagai seorang anak menurut dunia kedokteran dalam pendekatan konsepsi, maka jelas aborsi merupakan perbuatan yang dilarang karena dianggap sebagai perbuatan penghilangan nyawa.

Berdasarkan definisi anak dalam berbagai peraturan di atas, tidak ada satupun peraturan yang menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia kandungan anak yang hidup, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan standar hidup merupakan hak-hak dasar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berapapun usia kandungannya, bayi yang belum lahir berhak memperoleh perlindungan yang sama. Pengertian anak dalam hukum Indonesia juga sangat mendukung nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu penghormatan dan pengakuan terhadap janin dalam kandungan sebagai kehidupan baru dan suci yang harus dijaga serta dirawat termasuk janin hasil perkosaan sekalipun. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai adanya pengakuan hak hidup janin, sekilas aborsi yang dilakukan korban perkosaan memang melanggar hak hidup janin, namun jika dikaji lebih mendalam ada hak perempuan sebagai korban perkosaan juga yang harus dipertimbangkan jika konteks yang dibahas adalah hak asasi manusia.

Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) menjabarkan empat kategori hak reproduksi perempuan dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia internasional, yaitu:[11]

a. Hak atas kualitas kesehatan reproduksi dan seksual yang setinggi-tingginya.
b. Hak untuk membuat pilihan terkait otonomi reproduksi tanpa paksaan, prasangka, atau kekerasan.
c. Hak untuk secara mandiri menentukan jumlah dan interval kelahiran, serta kemampuan untuk mengakses pengetahuan dan konseling.
d. Hak untuk hubungan seksual yang memuaskan dan aman.

Rekomendasi umum No. 2 Tahun 1999 oleh Komite Konvensi Wanita atau CEDAW, yang berkaitan dengan Perempuan dan Kesehatan, memperkuat ketentuan mengenai akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan. Rekomendasi ini menegaskan bahwa kesehatan reproduksi perempuan adalah hak dasar yang harus dijamin bagi setiap perempuan.[12]

Di Indonesia sendiri, Ketentuan mengenai jaminan perlindungan bagi hak asasi perempuan secara general telah diatur dalam UUD NRI 1945, pasal 28 H menyatakan :

Pasal 28 H

1. Setiap manusia hak untuk hidup berkelimpahan secara material dan psikologis serta mendapatkan tempat tinggal yang layak menikmati lingkungan alami yang sehat dan memperoleh akses terhadap perawatan medis.
2. Setiap manusia memiliki hak untuk mengakses sumber daya dan mendapatkan perlakukan istimewa untuk menjamin kesempatan serta keuntungan yang setara, sehingga mendorong kesetaraan serta keadilan

[10] Sinambela, dkk, "Ilegitimasi Aborsi Oleh Korban Perkosaan Berdasarkan Hak Untuk Hidup Janin". *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol. 5, No. 2*, (2022) : 111-128.

[11] Siti Fatimah, *Hak Asasi Manusia Dalam Legalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan* (Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2021), hal.161

[12] *Ibid*

3. Setiap manusia memiliki hak atas jaminan sosial yang memfasilitasi perkembangannya secara penuh sebagai manusia yang memiliki martabat.
4. Setiap manusia memiliki hak atas kepemilikan pribadi, yang tak boleh dirampas secara sewenang-wenang oleh pihak mana pun.

Pengakuan hak asasi perempuan secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 49 ayat (3), yang menyatakan bahwa hak perempuan adalah "hak istimewa yang melekat pada perempuan karena fungsi reproduksinya, yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang." Setiap hak yang dimiliki perempuan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah dan negara tanpa terkecuali, serta tidak boleh dibatasi atau dicabut oleh siapa pun. Hak asasi perempuan bersifat intrinsik dan berlaku sejak lahir hingga meninggal dunia. Berdasarkan pada hak-hak yang diatur dalam ketentuan internasional dan nasional di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan, termasuk korban perkosaan, memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri (*self-determination*) dalam hal kesehatan reproduksi. Ini mencakup hak untuk memilih apakah akan meneruskan kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan atau tidak. Hak untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia. Terhadap kedua hak asasi manusia di atas, bila dikaitkan dengan teori hak asasi manusia, maka hak hidup janin merupakan implementasi dari teori hak kodrati, dimana ide dasar dalam teori hak kodrati adalah setiap individu memiliki posisi dalam kehidupan yang ditentukan oleh Tuhan, dan setiap manusia dianugerahi identitas individu yang unik yang terlepas dari negara. Kemudian terhadap hak asasi perempuan mengenai fungsi reproduksinya merupakan implementasi dari teori positivisme, dimana dalam teori ini, Asal usul suatu hak harus didefinisikan dengan jelas, seperti dalam konstitusi atau undang-undang negara. Legalisasi aborsi bagi korban perkosaan merupakan hak yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan.

Ada persinggungan hak antara hak perempuan hamil korban perkosaan yang ingin melepaskan diri dari tekanan sosial dan psikologis dan hak hidup janin yang sedang berkembang. Bila dikaji secara teoritis melalui pendekatan perundang-undangan, mengenai kedua hak tersebut sama-sama mendapatkan jaminan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait HAM. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, dalam hal terjadinya kehamilan pada korban perkosaan, hak siapa yang harus didahulukan kepentingannya. Gagasan pembatasan hak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara klaim atau kepentingan yang bersaing. Pembatasan HAM berkaitan dengan kewenangan suatu negara untuk memberikan Batasan perwujudan, perlindungan, dan pengakuan hak asasi manusia dalam kondisi dan ketentuan tertentu.[13]

Gagasan mengenai limitasi tercipta dari *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan diatur kembali dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Dalam instrumen HAM Internasional yang sering digunakan sebagai rujukan utama mengenai limitasi adalah Pasal 29 ayat (2) UDHR, yang menyatakan bahwa:*"In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society."* Artinya : "Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang semata-mata dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan moralitas, masyarakat umum. ketertiban dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis."

Di Indonesia, Konsep mengenai limitasi hak diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 28J ayat (2) dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
Dari rumusan artikel tersebut diatas, kendala yang mungkin terjadi dilakukan apabila :
1. Dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum

[13] Natarudin Dkk, *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia Untuk Pendidikan Dan Pelatihan POLRI* (Yogyakarta : Pusham UII, 2017), hal. 36

2. Menjaga hak dan kebebasan orang lain
3. Demi kepentingan nasional, keamanan dan ketertiban umum
4. Diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi

Mengenai legalisasi aborsi bagi korban perkosaan, penulis menganalisis bahwasannya negara menerapkan konsep limitasi hak terhadap pemenuhan dan mempertahankan hak untuk mempertahankan kehidupan janin selama kehamilan. Pembatasan ini dilakukan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan mengenai pengecualian aborsi yang dapat dilakukan oleh korban perkosaan, yang bertujuan memberikan pengakuan dan pemenuhan terhadap hak asasi perempuan terkait dengan fungsi reproduksinya dan memenuhi tuntutan yang adil atas dasar pertimbangan moral dari seorang korban kejahatan, dengan kondisi dan syarat tertentu. Syarat tertentu yang dimaksudkan adalah persyaratan mengenai diperbolehkannya aborsi bagi korban perkosaan.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum mengatur mengenai legalisasi aborsi bagi korban perkosaan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, tidak memuat unsur "trauma psikologis" dalam rumusan pasalnya, akan tetapi semua korban perkosaan diperbolehkan melakukan aborsi selama memenuhi persyaratan yang ditentukan lainnya. Karena pada dasarnya semua korban perkosaan pasti mengalami trauma, hanya tingkatannya saja yang berbeda. Hal ini dikarenakan penghayatan terhadap suatu peristiwa setiap orang akan berbeda, ada yang tingkat residensinya besar sehingga ia bisa cepat berdamai dengan keadaannya, ada juga yang tingkat residensinya rendah sehingga butuh proses untuk pulih. Eka Christiningsih Tanlain, S. Sos., M.Si, selaku penyuluh sosial ahli madya di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwasannya jika kita menetapkan berdasarkan rumusan pasal maka areanya harus hitam dan putih, akan tetapi jika kita berbicara mengenai hak asasi manusia tidak bisa ditentukan mengenai hitam dan putih. Belum semua aturan di Indonesia baik Undang-Undang maupun turunannya itu mengadaptasi hak asasi manusia dalam rumusan pasalnya, apalagi ketika peraturan itu disahkan isu kesehatan mental belum marak seperti sekarang. Peraturan zaman dahulu belum dapat mengakomodir level trauma mana yang bisa dilakukan aborsi maupun tidak bisa diaborsi.[14] Mengenai kondisi dan syarat tertentu yang dimaksudkan, jika dikaitkan dengan prinsip *legitime defense* (pembelaan diri yang sah), maka aborsinya di perbolehkan, karena tujuan aborsi tersebut semata-mata untuk Perbuatan menyelamatkan nyawa ibu berakibat kematian janin.

Analisis penulis terkait dengan pemberlakuan konsep limitasi hak dalam legalisasi aborsi bagi korban perkosaan selaras dengan pendapat Eka Christiningsih Tanlain, S. Sos., M.Si selaku Penyuluh Sosial Ahli Madya di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang menyatakan bahwasannya hak yang tidak dapat dibatasi memang akan selalu ada, namun hak tersebut bisa dibatasi jika berdasarkan Undang-Undang demi kesehatan dan ketertiban umum. Hal ini bukan berarti Undang-Undang yang ada itu mengingkari hak-hak yang tidak bisa dicabut dalam hak asasi manusia, terlebih jika kaitannya dengan korban kekerasan seksual. Dalam hal ini tidak hanya sekedar membicarakan hak hidup tetapi ada juga hak korban perkosaan, tidak semudah itu untuk mengatakan jika Undang-Undangnya melanggar hak hidup janin. Dalam hal ini balik lagi kepada asasnya, yakni asas keselamatan dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan janinnya, prinsip inilah yang menjadi dasar bukan hanya sekedar pasal-pasalnya.[15]

Penulis berpendapat, dalam hal legalisasi aborsi bagi korban perkosaan, selama korban perkosaan mengakses layanan aborsi tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan, maka tidak ada pelanggaran hak asasi di dalamnya. Karena sejatinya hak perempuan korban perkosaan untuk mengakses layanan kesehatan dalam hal ini kaitannya dengan aborsi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

SIMPULAN

Kesimpulan berikut diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru terkait legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, akan tetapi ketentuan dalam pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang kuat, sehingga dalam hal terjadinya kasus aborsi

[14] Eka Christiningsih Tanlain, S. Sos., M.Si, *Wawancara*, Penyuluh Sosial Ahli Madya di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, 09 Juli 2024.

[15] *Ibid*.

aman bagi korban perkosaan di masa sekarang hukum yang diterapkan atau ketentuan yang diberlakukan adalah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

2. Antara hak asasi perempuan dan hak hidup janin, keduanya memperoleh perlindungan yang sama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, dalam hal legalisasi aborsi bagi korban perkosaan, negara menerapkan konsep limitasi terhadap pemenuhan hak hidup janin berdasarkan syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai legalisasi aborsi demi kesehatan berlandaskan asas keselamatan dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan janinnya. Sehingga dalam hal ini tidak ada pelanggaran terhadap hak hidup janin selama memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amarawati, Tina. *Hukum dan Abortusi.* Yogyakarta : Deepublish. 2013

Elmina, Aroma. *Legalisasi Aborsi*. Yogyakarta: UII Press. 2019

Fatimah, Siti. *Hak Asasi Manusia Dalam Legalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan*. Purbalingga : Eureka Media Aksara. 2021

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta. 2017

Natarudin, dkk. *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia Untuk Pendidikan Dan Pelatihan POLRI*. Yogyakarta : Pusham UII. 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Jurnal

Fikar, Muhammad, Kemal. "Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Ipteks, Vol. 5, No. 1*, (2020) : 138-150

Jamal, Bima Guntara dan Fikri. "Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Literatur Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2*, (2021): 237

Rohmah, Siti Ngainnur dan Budiyanto, Budiyanto, "Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 7, No.4*, (2020): 801-812

Sinambela, dkk. "Ilegitimasi Aborsi Oleh Korban Perkosaan Berdasarkan Hak Untuk Hidup Janin". *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol. 5, No. 2*, (2022) : 111-128

Website

https://projectmultatuli.org/ia-diperkosa-lalu-hamil-disarankan-aborsi-tapi-polisi-melarangnya-korban-trauma-berat/